**KEMISKINAN DAN UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**(Studi Perbandingan Paradigma)**

A.Fatikhul Amin Abdullah

STKIP PGRI Sidoarjo

f4tih85@gmail.com

**Abstrak**

Kemiskinan menjadi masalah setiap negara yang tidak akan pernah berakhir. Karena kemiskinan sendiri memiliki makna taraf kesejahteraan berdasarkan standar hidup minimal masyarakat sehingga tingkat kesejahteraannya di bawah ambang nilai rata-rata kesejahteraan suatu negara. Hal ini yang menjadikan setiap negara memiliki masalah kemiskinan baik negara maju apalagi negara berkembang. Oleh sebab itu, pada artikel ini bukan akan lebih menyoroti upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu mengatasi kemiskinan. Studi ini menggunakan studi literatur. Hasilnya dari berbagai macam bentuk kemiskinan ada 3 macam yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural yang masing- masing tipe kemiskinan tersebut memerlukan upaya yang berbeda dalam upaya pemberdayaannya.

Kata kunci: kemiskinan, pemberdayaan, kesejahteraan, kelemahan,

**Pendahuluan**

Masalah kemiskinan yang menggeluti masyarakat, selamanya akan tetap bertengger sebagai salah satu bagian dari unsur kehidupan. Sudah menjadi *sunnatullah* atau hukum alam bahwa dunia terdiri dari dua pasang unsur (jodoh) yang berlawanan namun saling melengkapi antara unsur satu dengan unsur yang lain. Ada laki-laki ada perempuan, ada siang ada malam, ada atas ada bawah, ada pemimpin ada yang dipimpin, ada kaya ada miskin. Selama bumi masih berputar pada porosnya selama itu pula kemiskinan akan tetap berputar pula di bumi ini.

Kondisi dan fenomena kemiskinan yang mengungkung sebagian besar masyarakat kita hingga kini masih menyimpan banyak perdebatan. Perdebatan tersebut terutama seputar teori, konsep maupun metode-metode yang menyangkut tentang kondisi kemiskinan di sekitar kita. Perdebatan dimulai dengan penyusunan konsep, indikator, dan langkahlangkah termasuk kebijaksanaan yang harus diambil berhubungan dengan cara mengatasinya, atau dengan bahasa praktisnya penanggulangan kemiskinan. Hal ini menjadi makin menjadi kontras, tatkala pihak-pihak yang mengalami atau berada dalam ‘kondisi miskin’ terus bertambah jumlah maupun tingkat kemiskinannya.

Fenomena kemiskinan sendiri berkaitan erat dengan konsep dan permasalahan ketidak adilan dan disintegrasi kelompok, menunjuk pada sebuah jalinan konsep yang memberi sebuah pengertian yang saling berkait satu sama lain. Masing-masing konsep bisa dilihat secara tunggal dengan pengertian tersendiri atau analisis saling keterkaitan atau keterhubungan satu dengan lainnya dalam konteks kausalitas. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya ketidak adilan di masyarakat yang dapat mengganggu rasa kebersamaan, atau karena perlakuan yang tidak adil dalam perlakuan/pemerataan, ada masyarakat yang merasa miskin dalam berbagai hal yang berakibat pada pertentangan dan perpecahan.

Pola kekuasaan yang ada memungkinkan sebagian kecil atau sekelompok individu merasa dapat perlakuan yang tidak adil dan kesempatan yang sama memperoleh asset dan akses untuk berkembang, berpotensi pada terbentuknya kelompok minoritas yang merasa miskin karena proses pemiskinan yang berlangsung. Kelompok seperti ini akan menjadi akar di masyarakat yang berperilaku menyimpang sehingga terjadilah penentangan dan konflik dengan dampak yang lebih luas, yaitu disintegrasi masyarakat.

Sebaliknya gejala terjadinya disintegrasi di masyarakat dengan memudarnya kebersamaan dan rasa persatuan diantara sesama warga masyarakat memberi ciri pada melemahnya pola interaksi sosial, menghilangnya rasa kebersamaan diantara sesama warga hilangnya rasa kohesi sosial dan berdampak pada tindak ketidak adilan dan berlangsungnya proses pemiskinan dikalangan warga masyarakat.

**Pengertian Kemiskinan**

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika kemiskinan dibicarakan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (2007) kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun dipedesaan dan 480 kg beras/kapita/tahun. Sedangkan Kemiskinan sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976 adalah sebagai minimnya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya).
2. Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan).
3. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka
4. Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia.
5. Penciptaan lapangan kerja (*employment*) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Faktor Krusial Penyebab Kekurangan Pangan dan Kemiskinan Pada hakikatnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sepanjang sejarah manusia, dan mungkin akan tetap menjadi persoalan generasi masa kini dan mendatang. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin kurang memiliki kemampuan berusaha dan akses yang terbatas terhadap kegiatan ekonomi produktif, pendidikan, dan kesehatan. Mahatma Gandhi, mengemukakan, “Kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk yang paling buruk *(Poverty is the worst form of violence)* ”. Selanjutnya, Amartya Sen, salah seorang pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi mengemukakan bahwa “*orang jadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena tidak memiliki sesuatu*”.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terdiri dari:

1. *Kemiskinan natural*,
2. *Kemiskinan kultural*, dan
3. *Kemiskinan struktural* (Sumodiningrat, 1998).
4. Kemiskinan natural

Kemiskinan natural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996) disebut sebagai “*Persisten Poverty”* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

1. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adapt istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Penyebab kemiskinan ini karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.

1. Kemiskinan struktural

Kemiskinan structural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacammacam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas sebagai suatu *“lingkaran setan kemiskinan”* yang meliputi enam unsur, yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah.

Sebab-sebab terjadinya kemiskinan struktural antara lain adalah: (a) kurangnya demokrasi, sehingga mengurangi partisipasi masyarakat, seperti peternak rakyat, (b) kurangnya akses dan kontrol masyarakat miskin terhadap sumberdaya ekonomi produktif, (c) ketimpangan akumulasi dan distribusi aset produktif baik lahan maupun modal antar golongan masyarakat, (d) kebijakan yang bersifat lebih mementingkan pertumbuhan tanpa memperhatikan aspek pemerataan (*growth without equity)*, (e) peran pemerintah yang semakin berkurang dalam mengurangi ketimpangan sosial dan peran swasta yang berlebihan, (f) eksploitasi secara berlebihan terhadap sumberdaya alam yang berdampak buruk kepada penduduk miskin, dan (g) kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita suatu golongan masyarakat, karena struktur social masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Secara teoritis, kemiskinan struk-tural dapat diartikan sebagai suasana ke-miskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya, sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun -temurun selama bertahuntahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana ter –dapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya-raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayori -tas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa -apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya-raya biasanya berhasil memo-nopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik.

Selama golongan kecil yang kaya -raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masya -rakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural. Golongan yang menderita kemiskinan struktural itu, misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum migran di kota yang bekerja di se ktor informal dengan hasil yang tidak menentu, sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni permukiman kumuh, pedagang asong an, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih, atau apa yang dengan kata asing disebut *unskilled labour*. Golongan miskin ini meli-puti juga para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah yang seka-rang dapat dinamakan golongan ekonomi sangat lemah.

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya --kalaupun terjadi sifatnya lamban sekali-- apa yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Mengapa bisa sampai begitu?

Menurut pendekatan struktural, adalah terletak pada kungkungan struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur social yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Umpa-manya kelemahan ekonomi tidak me -mungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepas -kan diri dari kemelaratan.

Ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial -ekonomi di atasnya. Adanya ketergantung -an inilah yang selama ini berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin untuk *bargaining* dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, pedagang kecil tidak bisa mendapatkan harga yang layak atas barang yang mereka jual, pendek kata, pihak yang miskin relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

Inti dari masalah yang berhubungan dengan kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang dise but dengan *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur: (1) kemiskinan itu sendiri; (2) kelemahan fisik; (3) keterasingan atau kadar isolasi; (4) kerentanan; dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar - benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

**Indikator kemiskinan**

Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan,dan ekonomi (konsumsi/kapita). Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain

1. Pendekatan kebutuhan dasar,

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

1. Pendekatan pendapatan,

Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung memengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara kaku standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

1. Pendekatan kemampuan dasar,

Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.

1. Pendekatan objektif dan subjektif.

Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Stepanek, 1985)

Indikator utama kemiskinan berdasarkan pendekatan di atas dapat dilihat dari (1) kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat produksi; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya. Indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang jelas, yang dibuat oleh Bappenas.

Keterbatasan akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.

Keterbatasan akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan ditunjukkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha juga ditunjukkan lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga.

Keterbatasan akses layanan perumahan dan sanitasi ditunjukkan dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering dalam memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai.

Keterbatasan akses terhadap air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air. Dalam hal lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian.

**Kebudayaan miskin**

Menurut Oscar lewis dalam suparlan (1984) kebudayaan kemiskinan (terutama di perkotaan), adalah sebagai konskwensi dari masyarakat dengan kepadatan tinggi, terbatasnya akses-akses terhadap barang-barang konsumsi, layanan kesehatan dan sarana pendidikan. Kebudayaan kemiskinan juga bisa terwujud dalam situasi ekonomi yang terdeferensiasi, berkembamngnya system ekonomi uang, buruh upahan, dan system produksi untuk keuntungan.Demikian juga pada masyarakat yang mempunyai institusi social yang lemah untuk mengontrol dan memecahkan masalah sosial dan kependudukan, yang berdampak pada pertumbuhan tinggi dan pengangguran juga tinggi.

Kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam massyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis berciri kapitalisme. Sehingga yang mempunyai kemungkinan besar untuk memiliki kebudayaan kemiskinan adalah kelompok masyarakat yang berstratarendah, mengalami perubahan social yang drastic yang ditunjukkan oleh ciri-ciri :

1. Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin kedalam lembaga-lembaga utama masarakat, yang berakibat munculnya rasa ketakutan, kecurigan tinggi, apatis dan perpecahan;
2. Pada tingkat komunitas local secara fisik ditemui rumah-rumah dan pemukiman kumuh, penuh sesak, bergerombol, dan rendahnya tingkat organisasi diluar keluarga inti dan keluarga luas;
3. Pada tingkat keluarga ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, atau perkawinan usia dini, tingginya angka perpisahan keluarga, dan kecenderungan terbentuknya keluarga matrilineal dan dominannya peran sanak keluarga ibu pada anak-anaaknya;
4. Pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol adalah kuatnya perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi dan rasa rendah diri;
5. Tingginya (rasa) tingkat kesengsaraan, karena beratnya penderitaan ibu,lemahnya struktur pribadi, kurangnya kendali diri dan dorongan nafsu, kuatnya orientasi masa kini, dan kekurang sabaran dalam hal menunda keinginan dan rencana masa depan, perasaan pasrah/tidak berguna, tingginya anggapan terhadap keunggulan lelaki, dan berbagai jenis penyakit kejiwaan lainnya;
6. Kebudayaan kemiskinan juga membentuk orientasi yang sempit dari kelompoknya, mereka hanya mengetahui kesulitankesulitan, kondisi setempat, lingkungan tetangga dan cara hidup mereka sendiri saja, tidak adanya kesadaran kelas walau mereka sangat sensitif terhadap perbedaanperbedaan status;

Dengan enam ciri tersebut sebenarnya sudah dapat diidentifikasi kelompok masyarakat mana yang termasuk dalam kategori masyarakat dengan kebudayaan kemiskinan. Mungkin ciriciri yang dikemukakan oleh Oscar Lewis tersebut memang lebih banyak dapat dilihat pada cirri masyarakat miskin perkotaan.

Dorodjatun Kuntjoro Jakti yang menghimpun sejumlah hasil penelitian kependudukan dan masalah kemiskinan dalam ‘Kemiskinan di Indonesia’ (1986), melihat masalah kemiskianan muncul sebagai dampak dari kebijakan pembangunan khususnya pembangunan desa-kota yang tidak seimbang, sehingga berdampak pada berkembangnya fenomena kemiskinan (khususnya di perkotaan).

Pembicaraan secara khusus tentang cirri kemiskinan yang lain adalah munculnya fenomena sektor informal perkotaan seperti yang dibicarakan Prof. Dr. Rusli Ramli,MS dalam buku Sektor Informal Perkotaan : Pedagang Kaki Lima (1992). Dikemukakan bahwa dimulai dari kebijaksanaaan ekonomi, kesempatan kerja yang terbatas, dan sifat para birokrat kota kepada para pedagang kaki lima, dan terbentuknya jaringan sosial antara pedagang kaki lima dengan berbagai sektor lainnya, yang kemudian memberi wajah dominan pada sebuah kota. Rusli Ramli juga membicarakan tentang bagaimana latar belakang social para pedagang antara lain : pola orientasinya, organisasi, status perkawinan dan jumlah tanggungan, yang menggambarkan tentang adanya kemiskinan.

Teori-teori lain yang berkembang dan dikembangkan oleh para ahlinya, lebih banyak menyatakan bahwa kemiskinan adalah dampak dari masalah kependudukan khususnya migrasi desa-kota yang tidak terkendali. Kemiskinan dan kebudayaan kemiskinan terbentuk dari suatu situasi, yang mengelompokkan masyarakat dalam dua kategori, yaitu miskin dan tidak miskin.

Selain itu, kebudayaan kemiskinan membuat sebuah kategorisasi dengan ciri-ciri khusus, dan juga dampak yang ditimbulkannya pada kelompok miskin tersebut. Kebudayaan kemiskinan merupakan adaptasi dan penyesuaian oleh sekelompok orang pada kondisi marginal mereka, tetapi bukan untuk eksistensinya karena sejumlah sifat dan sikap mereka lebih banyak terbatas pada orientasi kekinian dominannya sikap rendah diri, apatis, dan sempitnya pada perancanaan masa depan.

**Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan azas partisipasi (*participatory*), jaringan kerja, kemandirian dan keadilan (*equality*) yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan (akses) sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian. Proses pemberdayaan memerlukan tindakan aktif subyek untuk mengakui daya yang dimiliki obyek dengan memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum akhirnya obyek akan beralih fungsi menjadi subyek yang baru. Karena proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar, maka subyek disebut sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang mementingkan tindakan aktif obyek atau masyarakat miskin sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang efektif.

Proses pemberdayan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok (kolektif). Tetapi karena proses ini merupakan proses wujud perubahan sosial atau status hirarkhi lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib’’ untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Freidmeann, 1993:3). Di dalam kelompok terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dengan mengenali kepentingan mereka bersama.

Dalam kebersamaan, tiap-tiap anggota ikut bertanggung jawab, saling mempercayai dan saling melayani. Kondisi ini merupakan prasyarat yang penting di dalam proses koniestentisasi. Kelompok dapat juga dipakai sebagai alat bagi para anggota untuk mengembangkan aspirasi dan potensi mereka. Pembentukan kelompok menyediakan Suatu dasar (*platform*) bagi terciptanya kohesi sosial anggota kelompok. Kohesi sosia akan terbentuk setelah diadakannya pertemuan rutin untuk membahas aktivitas kelompok dan permasalahannya. Adanya kedekatan dan mutual intersts dari anggota kelompok membantu kelompok untuk membentuk semangat sukarela. Kondisi ini akan membantu kelompok untuk mengurangi kerentanan individu dalam menghadapi goncangan yang mendadak dan kesengsaraan. Akibat sinergestik dari ikatan kelompok ini nantinya akan membantu mengatasi masalah mereka.

Namun demikian sudah banyak bukti adanya pemberdayaan melalui kelompok-kelompok swadaya di pedesaan hanya sebatas slogan dan jargon yang di paksakan, bahkan terkesan hanya untuk memenuhi target pembangunan dan yang seringkali terjadi adalah pemerataan bentuk-bentuk program yang seragam dimana bukan merupakan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi pembentukan karakter kelompok yang mengikat seperti sistem interaksi, norma, kontinuitas, identitas social dan motif atau tujuan yang sama mengalami kegagalan. Akibatnya kelompok tersebut hanya berfungsi sebagai kumpulan orang-orang tanpa ikatan yang diperalat oleh orang yang mempunyai kepentingan pribadi dan daya yang lebih kuat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keberadaan kelompok-kelompok swadaya di masyarakat dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat asalkan ditangani secara profesional dan adanya pengakuan atas perubahan dari tadinya obyek menjadi subyek. Di samping itu program-program yang bergulir memang merupakan prioritas kebutuhan dari masing-masing anggota kelompok dengan tidak mengabaikan kepentingan individu dan mempertimbangkan kesesuaian potensi, kondisi, dan permasalahan yang terdapat di masing-masing daerah.

Selain dilakukan dengan pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama, diperlukan arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan guna menunjang eksistensi kelompok tersebut, yaitu suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat walaupun secara pasti tidak akan terlepas dari kemiskinan tetapi kita berharap mampu meminimalisir adanya kemiskinan di negara kita khususnya. Oleh sebab itu perlu juga kita tahu indicator apa yang menjadi tolok ukur kesejahteraan rakyat yang itu menjadi salah satu tanda terbebasnya rakyat dari jeratan kemiskinan.

**Indikator Kesejahteraan Rakyat**

* 1. Tingkat Kesehatan

Bisa dilihat dari angka kematian bayi yang minim dan angka harapan hidup panjang, dan segala masalah kesehatan bisa teratasi.

* 1. Pendidikan

Tingkat pendidikan sudah tidak hanya demi memenuhi program wajib belajar, tetapi sudah jauh melampaui program tersebut. Bahkan pendidikan sidah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sama dengan sandang, pangan, dan papan. Dan masalah pendidikan tidak ada yang sulit, seperti contoh mampu memperoleh pendidikan yang diinginkan dengan model dan tempat dimanapun. Akses pendidikan tidak jadi masalah.

* 1. Tenaga Kerja

Jumlah pengangguran sangat minim dan sebagian besar sudah masuk dalam sector industry. Sehingga tidak lagi selalu tergantung pada alam.

* 1. Mortalitas dan Fertilitas

Angka kematian dan kelahiran sangat minim sehingga keseimbangan penduduk normal. Dengan kenormalan itu mampu menstabilkan kebutuhan masyarakat, sehingga semua kebutuhan masyarakat yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya terpenuhi dengan baik tidak sampai ada kesenjangan.

* 1. Perumahan

Jumlah gelandangan sangat minim bahkan sebagian besar masyarakat sudah memiliki rumah permanen.

* 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Jumlah pendapatan perkapita yang tinggi mempengaruhi pengeluaran tiap keluarga (rumah tangga). Sehingga dengan adanya pendapatan perkapita yang tinggi semua kebutuhan bisa terpenuhi dan menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi makmur.

**DAFTAR PUSTAKA**

Suparlan, Dr. Parsudi (penyunting): *Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan;* 1984. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.

Penerbit Buku Kompas Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun : *Kemiskinan di Indonesia; 1*986. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Lewis, Oscar : *Kisah Lima Keluarga;* 1988. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Ramli,Prof.Dr. Rusli : *Sektor Informal Perkotaan Pedagang kaki Lima;* 1992. Jakarta. Penerbit Ind-Hill-Co.

Andre Bayo Ala. 1996. *Kemiskinan dan Strategi memerangi Kemiskinan*. Liberti Yogyakarta.

Supriyatna Tjahya. 1997. *Birokorasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan.* Humaniora Utama Press Bandung.

Sutrisno R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan.* Philosophy Press bekerja sama Fakultas filsafat UGM. Yogyakarta.